

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA LAYANAN KEPEGAWAIAN
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA
PERIODE SEMESTER II 2020



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL II
2021**

A. Pendahuluan

Birokrasi yang cekatan, penuh dedikasi dan bebas dari korupsi merupakan salah satu kondisi yang paling diharapkan oleh masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi seperti ini hanya bisa terwujud jika seluruh pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkannya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh instansi-instansi adalah melalui pembangunan Zona Integritas yang bertujuan untuk menciptakan instansi pemerintahan yang bebas dari korupsi dan bersih dalam melayani. Seluruh jajaran pegawai baik itu dari tingkat pimpinan tinggi hingga pelaksana dan pejabat fungsional harus ikut berkomitmen guna mencapai pembangunan zona integritas yang efektif. Masing-masing pegawai harus secara proaktif melandaskan seluruh kegiatan kerja mereka dengan semangat perubahan, meninggalkan praktek-praktek yang mengarah pada perilaku korupsi (pungutan liar, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang) dan inefisiensi (budaya malas bekerja). Pada sisi yang lain, masyarakat juga harus mau dan berani untuk memberikan saran, masukan, dan laporan-laporan yang dapat membantu pencegahan, pengawasan serta penindakan hukuman terhadap penyelewengan yang mungkin terjadi. Peran serta masyarakat penerima layanan tersebut salah satunya dapat diakomodasi melalui pengisian instrumen survei persepsi mengenai korupsi di instansi pemerintah yang memberikan layanan. Hasil dari survei tersebut berupa indeks yang disebut dengan indeks persepsi korupsi (IPK). Tujuan dilakukannya pengukuran indeks persepsi korupsi ini adalah sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan mengenai pemberian layanan kepegawaian dan khususnya juga sebagai tindak pengawasan, pencegahan, dan pelaporan terhadap praktek yang mengarah pada tindakan korupsi.

B. Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Layanan Kantor Regional II BKN Surabaya

Survei persepsi korupsi pada layanan kepegawaian di Kantor Regional II BKN Surabaya

dalam laporan ini, dilaksanakan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020. Responden survei merupakan para penerima layanan kepegawaian pada PTSP Kantor Regional II BKN Surabaya, baik yang datang atas nama individu pegawai/pensiunan maupun yang mewakili instansi. Para responden diminta untuk mengisi kuesioner yang merupakan instrumen survei ini. Instrumen tersebut terdiri 9 (sembilan) pernyataan yang berhubungan dengan bagaimana pelayanan kepegawaian yang diberikan, yaitu:

1. Prosedur Pelayanan yang ditetapkan di PTSP Kantor Regional II BKN sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Petugas Pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang.
3. Pada Pelayanan Kepegawaian Kantor Regional II BKN Surabaya tidak terdapat praktik percaloan / perantara yang tidak resmi.
4. Petugas pelayanan pada Kantor Regional II BKN Surabaya tidak diskrimatif
5. Tidak terdapat pungutan liar di Pelayanan Kepegawaian Kantor Regional II BKN Surabaya
6. Petugas Pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan
7. Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.
8. Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan yang diberikan.
9. Produk /jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia

Respon terhadap kesembilan pernyataan tersebut diukur dalam 4 (empat) skala, mulai dari sangat baik/sangat setuju sampai dengan sangat buruk/sangat tidak setuju. Skor yang didapat dari skala tersebut dibagi menjadi:

No	Interval	Nilai Interval Konversi	Nilai indeks	Keterangan
1	1 – 1,75	25,00 - 64,99	Sangat rendah	Tidak bersih, sangat korup, resiko kejadian korupsi sangat tinggi
2	1,76 – 2,50	65,00 - 76,60	Rendah	Tidak bersih, cenderung korup, resiko kejadian korupsi cukup tinggi
3	2,51 – 3,25	76,61 - 88,30	Tinggi	Bersih, resiko kejadian korupsi rendah
4	3,26 – 4,00	88,31 – 100,00	Sangat Tinggi	Sangat bersih, resiko kejadian korupsi sangat rendah – bebas dari korupsi

C. Hasil Survei Persepsi Korupsi

Instrumen berupa kuesioner persepsi korupsi dibagikan kepada para penerima layanan kepegawaian pada Kantor Regional II BKN Surabaya mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah lebih lanjut berjumlah 97, dan dari pengolahan data didapat hasil sebagai berikut:

1. Reponden berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 61 (62,88%) dan sisanya 36 (37,12%) perempuan.
2. Responden sebagian besar (49,4%) berpendidikan S-1, kemudian diikuti yang berpendidikan S-2 sebanyak 37,1%, D-III sebanyak 8,2%, SMA sebanyak 5,3%.
3. Sebanyak 17,5% merupakan pengguna layanan dari Bidang Pengangkatan dan pensiun, 9,27% 21,6% pengguna layanan Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, pengguna layanan Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian, 31,9% pengguna layanan Bidang Informasi Kepegawaian, dan 19,73% pengguna lebih dari satu bidang layanan.
4. Prosedur pelayanan yang tersedia dinyatakan sudah memadai sehingga tidak berpotensi menimbulkan korupsi. Karena pelayanan hanya diberikan melalui PTSP dan online melalui aplikasi, sehingga tidak lagi secara pribadi di ruangan-ruangan tempat kerja, sehingga terpadu dan lebih mudah pemantauannya (skor sangat tinggi: **3,752**). Para pemberi layanan pun telah ditunjuk berdasarkan keahlian masing-masing

dan/atau berdasarkan jadwal tugas yang telah ditentukan sehingga meminimalkan kemungkinan adanya praktek percaloan dan pungutan liar (skor: **3,711** dan **3,701**).

5. Persepsi terhadap para pemberi layanan juga tinggi. Para petugas dipersepsikan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang (skor sangat tinggi: **3,701**), tidak diskriminatif dalam memerikan layanan dan menangani aduan (skor sangat tinggi: **3,711** dan **3,721**), serta tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan (skor sangat tinggi: **3,701**) bahkan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan (skor sangat tinggi: **3,701**).
6. Selain itu, para responden juga mempersepsikan bahwa produk jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia (skor sangat tinggi: **3,701**). Artinya tidak menerima layanan yang di luar prosedur yang ada, yang dapat menimbulkan resiko korupsi.
7. Secara rata-rata, indeks persepsi korupsi Kantor Regional II BKN Surabaya adalah sebesar **3,711** yang mana masuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya, layanan kepegawaian yang diberikan oleh Kantor Regional II BKN dipersepsikan oleh responden sangat bersih dan resiko terjadinya korupsi sangat rendah.

D. Simpulan dan Saran

Pelayanan kepegawaian pada Kantor Regional II BKN Surabaya dipersepsikan sangat baik dan sangat bersih oleh para responden, bahkan semua item pernyataan mendapatkan skor sangat tinggi yang berarti resiko kejadian korupsi sangat rendah. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBBM pada PTSP Kantor Regional II BKN Surabaya telah menuju arah yang diinginkan. Meski demikian perlu diingat bahwa usaha untuk mencegah korupsi dan meningkatkan layanan perlu untuk terus dilakukan secara konsisten. Komitmen seluruh pihak baik pimpinan, pegawai, maupun pihak yang dilayani harus selalu diteguhkan kembali.

Untuk peningkatan di masa mendatang, perlu untuk terus melakukan sosialisasi dan internalisasi mengenai gratifikasi, untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami definisi, konsekuensi, tata cara pengaduan, serta manfaat pencegahannya. Penting juga dipertimbangkan untuk secara berkala memberikan *reward* bagi pihak-pihak yang secara nyata dan konsisten mendukung pencegahan korupsi, melalui suatu mekanisme yang tepat untuk memastikan keakuratannya dan tetap berdasarkan ketentuan serta aturan yang berlaku.

Surabaya, 04 Januari 2021

Kepala Kantor Regional II BKN



 Ditandatangani Secara Elektronik
Drs. Heru Purwaka, MM
NIP. 196302081991031001